



## Pengelola Persewaan Skuter Listrik Siap Ditata

**YOGYA, TRIBUN** - Sejumlah penyedia jasa persewaan skuter listrik tetap beroperasi, Jumat (1/4). Meskipun, Gubernur DIY telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang larangan operasional kendaraan penggerak motor listrik di tiga ruas jalan sumbu filosofi.

Ketua Paguyuban Gowongan Skuter, Edy Kurniawan, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah anggota paguyuban untuk merespons kebijakan dari Gubernur DIY. Mereka memutuskan bahwa operasional penyewaan skuter masih dibuka kemarin.

Menurutnya, operasional skuter listrik yang dilarang hanya di kawasan Malioboro saja. "Awalnya kan di Malioboro jadi sesuai kesepakatan kami anggota paguyuban ya hari ini tetap buka. Kami tetap menjaga supaya skuter yang dari Tugu tidak masuk ke Malioboro," kata Edy saat dihubungi Jumat (1/4).

Edy menjelaskan, pihaknya juga telah bersepakat bahwa pengelola skuter mes-

ti membuka layanan operasional sejak jam enam sore sampai tengah malam. Jika ada yang melanggar pihaknya telah menyiapkan sanksi berupa penutupan lapak.

Paguyuban juga menempatkan seksi ketertiban untuk memantau aturan itu. "Ada tim kontrol nanti di dekat rel dan pertigaan kopi jos. Mereka yang akan mengawasi kalau ada penyewa yang dari Tugu dan kami mencegah ke Malioboro," jelas dia.

Edy menyatakan, saat ini total ada sebanyak 34 anggota yang tergabung dengan paguyuban itu.

Mereka merupakan para pengelola skuter listrik yang biasa menyewakan di sepanjang jalan P. Mangkubumi.

Pihaknya mengaku juga tidak terlalu keberatan terbitnya SE Gubernur soal larangan skuter listrik itu. Hanya saja, ia meminta agar pemerintah memberikan waktu kepada pengelola skuter untuk melakukan persiapan.

"Karena kan pasti dari SE itu ada sosi-

alisasi dan kita pengen tahu sosialisasinya batas mana. Kalau dari aturan infonya sampai Senin tanggal 4 April, makanya ya kami tetap buka," ujarnya.

Pihaknya juga mengaku siap jika ditata oleh pemerintah. Namun tetap dengan prosedur yang berlaku dan meminta agar skuter listrik diberikan lokasi alternatif. "Tentu kalau langsung ada pelarangan atau pemindahan harus ada waktu, kami ya siap ditata, tapi ya cari solusi buat ini," pungkasnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merasa terbantu atas terbitnya SE tersebut.

Kepala Dishub DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan, SE tersebut sebenarnya respons pemerintah terhadap apa yang terjadi di kawasan Malioboro selama ini. "Ngarsa Dalem menyampaikan Malioboro semestinya itu bebas dari kendaraan yang secara operasional belum diatur, contohnya otoped atau skuter listrik," katanya. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005